

Strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Banten

Shanty Kartika Dewi¹, Anis Fuad²

^{1 2}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

Abstract

Indonesia, as part of the Southeast Asian region, is still experiencing a situation that cannot be separated from the problem of stunting. Every year the prevalence of stunting in Indonesia tends to experience fluctuating conditions. These fluctuating conditions indicate inconsistencies in the implementation of policy programs to reduce stunting. When referring to the WHO maximum stunting prevalence standard of 20%, most provinces in Indonesia have not been able to meet this standard. One of them is Banten Province with a stunting prevalence rate in 2019 reached 24.11%. The conceptualization of the interaction pattern of stunting problems formed from the results of systems thinking is visualized in the form of a causality diagram model. The model, built using the systems dynamics method, serves to provide an understanding of the structural dynamics of the stunting problem, based on the cause-and-effect relationships between the components that make up the problem. This became the basis for the segmenting, targeting, and positioning (STP) strategy planning process. The output of STP strategy planning is compiled into a quality document that is determined according to the level needed to accelerate stunting reduction.

Keywords: *Stunting, Segmenting, Targeting, Positioning*

Pendahuluan

Permasalahan Stunting menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan peradaban manusia, yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF) dan The World Bank (2021) melaporkan, secara global terdapat 149,2 juta anak di bawah 5 tahun yang menderita stunting pada Tahun 2020. Dimana lebih dari separuh anak di bawah 5 tahun yang terkena stunting berada di Asia dan dua dari lima terdapat di Afrika.

Global Nutrition Report (2020) secara lebih spesifik menyatakan, kawasan Asia Tenggara mengalami prevalensi stunting

sebesar 24,7%, yang menjadikan kawasan di Asia dengan prevalensi stunting tertinggi kedua setelah Asia Selatan.

Indonesia sebagai bagian kawasan Asia Tenggara, masih mengalami situasi yang tidak terlepas dari permasalahan *stunting*. Bahkan setiap tahun prevalensi *stunting* di Indonesia cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi berubah-ubah tersebut, mengindikasikan adanya inkonsistensi implementasi program kebijakan penanganan penurunan *stunting*.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi *stunting* di Indonesia pada Tahun 2007 sebesar 36,8%.

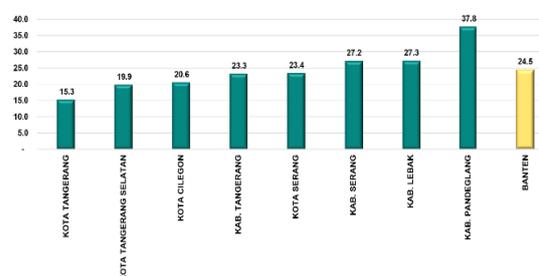
Mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2010 menjadi 35,6% dan kembali meningkat menjadi 37,2% pada Tahun 2013. Hingga data terakhir Riskesdas Tahun 2018 prevalensi balita *stunting* di Indonesia menunjukkan nilai sebesar 30,8% (Kemenkes RI. 2018).

Data hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menunjukkan prevalensi *stunting* nasional berada pada angka 27,67% (BPS. 2019). Estimasi terbaru dari WHO, menunjukkan Tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat kedua dengan kategori prevalensi *stunting* tinggi (31,8%) dikawasan Asia Tenggara setelah Timor Leste (48,8%). Kondisi tersebut, menjadikan prevalensi *stunting* Indonesia berada pada posisi ke 115 dari 151 negara di dunia. (WHO et al. 2021).

Sebaran *stunting* di Indonesia pada dasarnya terdapat di seluruh Provinsi, dengan proporsi prevalensi yang tidak merata. Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019, menunjukkan kasus prevalensi *stunting* tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 43,82% dan yang terendah berada di Provinsi Bali sebesar 14,42%. Apabila merujuk pada standar batas maksimal prevalensi *stunting* WHO sebesar 20%, maka hampir sebagian besar Provinsi di Indonesia belum dapat memenuhi standar tersebut. Salah satunya adalah Provinsi Banten dengan angka prevalensi *stunting* pada Tahun 2019 yang mencapai 24,11% (BPS. 2019).

Banten sebagai salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan *stunting*. Data terbaru dari hasil Studi Status Gizi Indonesia

(SSGI) Tahun 2021, menyatakan Provinsi Banten mengalami peningkatan prevalensi *stunting* menjadi 24,5%. Nilai tersebut, melampaui kondisi *stunting* secara nasional pada tahun yang sama, justru mengalami penurunan menjadi 24,4% (Kemenkes RI dan SSGI. 2021). Secara terperinci sebaran prevalensi *stunting* berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: (Kemenkes RI dan SSGI. 2021).

Gambar 1. Sebaran Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

Gambar 1 memperlihatkan bahwa kasus balita *stunting* paling banyak terdapat di Kabupaten Pandeglang dengan persentase mencapai sebesar 37,8%. Sedangkan untuk kasus terendah berada di Kota Tangerang yaitu sebesar 15,3%. Terdapat dua kabupaten yang memiliki nilai prevalensi *stunting* melampaui rata-rata nilai prevalensi *stunting* di tingkat Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak (27,3%) dan Kabupaten Serang (27,2%). Dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebesar 23,6%, maka prevalensi *stunting* pada Tahun 2021 tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Apalagi jika mengacu pada target RPJMN Tahun 2020-2024

sebesar 21,1% pada Tahun 2021 atau bahkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan WHO sebesar 20%, maka prevalensi stunting di Provinsi Banten masih jauh dari harapan.

Ditinjau dari aspek kesehatan istilah stunting, merujuk pada kondisi gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting, definisi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Melalui Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, ditetapkan bahwa stunting sebagai kondisi dimana Panjang Badan (PB) atau Tinggi Badan (TB) per Umur anak dibawah minus dua standar deviasi (<-2SD).

Umumnya stunting dapat terjadi pada periode 1000 hari pertama kelahiran, yaitu pada fase pemuahan hingga usia dua tahun. Pada masa itu, pertumbuhan anak berada pada kondisi paling rentan terhadap kekurangan nutrisi dan faktor tekanan lingkungan. Stunting memiliki konsekuensi fungsional yang merugikan pada anak. Beberapa dari konsekuensi tersebut termasuk kognisi yang buruk. Apabila disertai dengan penambahan berat badan yang berlebihan di masa kanak-kanak, berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis terkait gizi di masa dewasa hingga kematian.

Berbagai penelitian membuktikan stunting menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita di dunia dan dapat berdampak pada rendahnya kualitas hidup di masa yang akan datang. Menurut hasil penelitian dari Myatt et al (2018), stunting adalah faktor penyebab kematian dari hampir dua juta anak setiap tahun dan berkontribusi terhadap 12% atas kehilangan usia harapan hidup sesuai dengan kecacatan yang diderita. Bahkan pernyataan Aguayo dan Menon (2016), menegaskan bahwa stunting menjadi faktor penyebab sekitar satu juta kematian anak setiap tahun. Stunting terbukti berimplikasi besar dan menyebabkan kerugian signifikan dari sumber daya manusia dan produktivitas (Behrman et al., 2015).

Meningkatnya jumlah penderita stunting di Provinsi Banten pada Tahun 2021, memerlukan upaya percepatan penurunan stunting. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap tinggi badan dan kemampuan otak, namun juga membawa konsekuensi signifikan terhadap kematian. Lebih luas dari itu bahaya stunting tidak hanya terhadap individu penderita, namun juga menimbulkan efek domino terhadap aspek kehidupan lainnya.

Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan stunting di Indonesia terbukti membutuhkan biaya penanganan sekaligus dampak kerugian yang besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021), alokasi anggaran percepatan penurunan stunting Tahun 2021 telah mencapai Rp115,74 triliun. Dimana potensi kerugian ekonomi

yang ditimbulkan stunting dapat mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Tumbuh kembang anak merupakan representasi esensial dari kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan stunting menjadi ukuran akan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek ekualitas pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi masyarakat yang layak. Oleh karena itu, sangat relevan bahwa prevalensi stunting disebut sebagai salah satu indikator tercapai tidaknya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Tingginya prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dapat mengancam hilangnya generasi yang kompetitif berdaya saing. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan optimal, maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan krisis multidimensi dengan kerugian yang tidak ternilai. Oleh karena itu, strategi penyelesaian isu stunting tidak dapat diatasi dengan hanya bersifat reaktif dalam mengimplementasikan program kebijakan. Diperlukan pendekatan antisipatif dan generatif yang dapat menemukan struktur permasalahan stunting sebagai suatu sistem yang komprehensif, salah satunya melalui pendekatan segmenting, targeting, dan positioning. Dengan demikian dapat diketahui keterhubungan dari setiap aspek yang mempengaruhi prevalensi stunting, sekaligus menentukan intervensi kebijakan yang dapat memberikan efek perubahan substansial dan signifikan terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting.

Pembahasan

Mereduksi prevalensi stunting di Provinsi Banten atau bahkan di Indonesia bukanlah misi yang mustahil. Dengan tersedianya sumber daya yang mumpuni, kemampuan dan komitmen antar sektoral yang telah terjalin, serta budaya kearifan lokal masyarakat Banten, dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di Tahun 2024. Ditambah banyaknya contoh nyata negara, yang telah mengawali keberhasilan menurunkan angka stunting secara signifikan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan. Dengan demikian secara sinergis dapat diadopsi, diadaptasi ataupun dimodifikasi guna menyusun strategi percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Banten melalui program yang konvergen.

Sebagai contoh keberhasilan Negara Peru, yang mampu menerapkan infrastruktur di tingkat daerah. Daerah menjadi lokus untuk menerjemahkan kebijakan penanganan stunting di tingkat pusat kedalam tindakan yang dapat diimplementasikan. Contohnya menerapkan aksi responsif dan massif terkait pemberian makanan tambahan dengan melibatkan partisipasi elemen masyarakat yang tersebar diberbagai fasilitas umum. Hal ini terbukti membawa dampak perubahan signifikan dalam praktik penyaluran serta efektivitas sasaran, sehingga berkontribusi pada pengurangan angka stunting.

Menurut Andrés et al (2014), keberhasilan Peru menekan angka stunting diantaranya keberlanjutan dalam menerapkan strategi nutrisi berdasarkan tiga dimensi. Secara horizontal, terlihat pada koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menyatukan

kebijakan bersama. Secara vertikal, terlihat pada implementasi strategi gizi di seluruh pemerintah pusat, regional dan kota. Secara finansial, terlihat pada koordinasi dan alokasi dana gizi bersyarat sehingga menciptakan insentif yang lebih besar untuk koordinasi horizontal maupun vertikal.

Keberhasilan Negara Ekuador, dalam memberi dukungan progresif pada aspek ketahanan pangan. Hal ini terbukti berkontribusi signifikan dalam pengentasan daerah rentan pangan, yang seringkali berkorelasi dengan masalah stunting. Seperti halnya yang diterapkan pada Proyek Pertanian Perkotaan Partisipatif di daerah Quito ibu kota Ekuador. Proyek tersebut terbukti mampu mendukung lebih dari 12.000 individu melalui pembangunan lebih dari 1.000 kebun aktif, termasuk 140 kebun masyarakat yang menghasilkan sekitar 400 ton makanan per tahun. Diperkirakan 47% dari produk tersebut dijual dan sisanya disimpan untuk konsumsi rumah. Peserta memperoleh setidaknya US\$ 55 per bulan dari penjualan produk dan menghemat setidaknya US\$ 72 per bulan untuk pembelian makanan, dengan mengonsumsi apa yang mereka tanam (FAO. 2014).

Keberhasilan lainnya juga diperlihatkan negara tetangga yakni Thailand. Dimana memprioritaskan pendekatan penanganan stunting, berbasis komunitas terpadu yang didukung oleh dukungan teknis, sumber daya, dan komitmen politik yang berkelanjutan. Mengadopsi pendekatan multisektoral, Thailand menetapkan tujuan yang ambisius dan komprehensif untuk meningkatkan gizi pada bayi di pedesaan, anak di bawah lima tahun,

serta wanita hamil dan menyusui. Selain itu, melalui peningkatan perawatan kesehatan dan kebersihan, peningkatan ketersediaan makanan, pembentukan 1.200 pusat gizi anak untuk memerangi kekurangan gizi, pendidikan gizi, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi kelompok rentan. (Gillespie et al. 2016).

Berbagai contoh negara yang dinilai berhasil dalam mengatasi permasalahan stunting, menunjukkan adanya penerapan strategi pelibatan peran seluruh elemen masyarakat. Mengingat setiap aspek baik ekonomi, kesehatan, lingkungan hingga sosial budaya menjadi faktor penentu prevalensi stunting. Hal ini menandakan stunting adalah permasalahan multidimensi yang kompleks (rumit), sehingga sulit diatasi dengan hanya pendekatan sektoral atau parsial. Diperlukan rangkaian strategi multisektoral, yang mengedepankan konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program di setiap lini baik pusat, daerah, hingga desa.

Pendekatan multisektoral berbasis strategi *Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP)* menjadi alternatif kebijakan yang dapat mensinergiskan sekaligus menyederhanakan setiap program penurunan prevalensi stunting di berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu juga dapat meningkatkan keterlacakan keterhubungan antar program stunting, yang berguna dalam mengidentifikasi inefisiensi program yang dilaksanakan.

Segmenting merupakan kebijakan untuk mensegregasi stakeholder, berdasarkan karakteristik, kebutuhan ataupun peran pemenuhan target yang sama guna menurunkan angka stunting. Pendekatan ini, bermanfaat

mengatasi tumpang tindih serta inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi sektoral. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan antar sektor akan lebih efektif dan efisien, dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua stakeholder.

Targeting, adalah menentukan sasaran dari segmen mana yang menjadi prioritas program penurunan angka stunting di Provinsi Banten. Hal ini diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip rasionalitas terukur, baik berdasarkan efektifitas maupun efisiensi; anggaran; aksesibilitas; atau output yang dituju. Dengan begitu dapat ditentukan kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki terhadap program, serta potensinya sebagai leverage (pengungkit) dalam percepatan penurunan stunting.

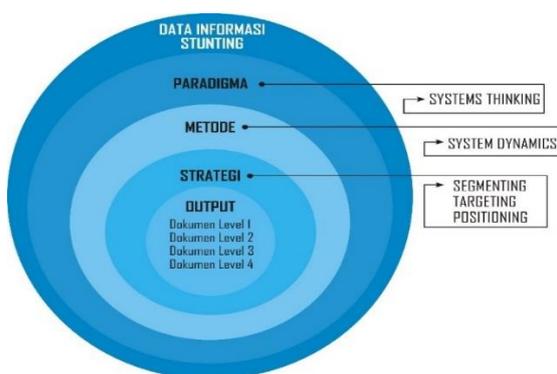
Positioning, adalah memastikan tingkat keberlanjutan setiap strategi program penurunan angka stunting yang diterapkan oleh penerima layanan, baik antar sektoral pemangku kebijakan maupun masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mengetahui program dengan positioning yang berkelanjutan, dilakukan diferensiasi berdasarkan tingkat investasi anggaran serta keterlibatan stakeholder terhadap penurunan angka stunting, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 9 (Sembilan) program prioritas yang ditawarkan penulis sebagai bentuk intervensi prevalensi stunting, dengan menerapkan strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) di Provinsi Banten, meliputi:

1. Donor anggaran dan alokasi anggaran.

2. Investasi data serta model analisis pengawasan, monitoring dan evaluasi terintegrasi, sebagai bagian dalam sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Supporting Systems)
3. Penanganan kerawanan pangan dan masyarakat miskin
4. Edukasi keluarga rentan stunting
5. Pemberdayaan perempuan berbasis komunal
6. Peningkatan kualitas tempat tinggal (permukiman), berbasis WASH
7. Peningkatan nutrisi serta gizi ibu hamil dan balita.
8. Promosi aksi massif terkait asi eksklusif berbasis peer to peer.
9. Fortifikasi Suplemen dan MPASI berbasis bank pangan.

Konsep STP pada dasarnya merupakan bagian dalam perencanaan, penciptaan dan penyampaian program secara selektif dan spesifik. STP dapat membantu mengidentifikasi program mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian program dapat menjadi solusi konkret di setiap tingkatan kemitraan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka akselerasi penurunan prevalensi stunting. Konseptualisasi STP sebagai bagian dalam strategi kebijakan percepatan penurunan stunting diperlihatkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Konseptualisasi Strategi STP

Konstruksi strategi segmenting, targeting dan positioning, dibangun berdasarkan data dan informasi eksisting stunting di Provinsi Banten yang menjadi dasar proses berpikir perencana. Dimana perspektif yang digunakan untuk memahami data dan informasi, mengacu pada paradigma systems thinking. Cara berpikir sistem merupakan pendekatan dalam memandang fenomena kompleksitas permasalahan stunting di Provinsi Banten secara komprehensif. Melalui paradigma ini, akan teridentifikasi pola interaksi antar komponen-komponen penyusun permasalahan stunting secara menyeluruh.

Konseptualisasi pola interaksi permasalahan stunting yang terbentuk dari hasil berpikir sistem, selanjutnya divisualisasikan kedalam bentuk model diagram kausalitas. Model yang dibangun dengan metode systems dynamics ini, berfungsi memberikan pemahaman terkait dinamika struktur permasalahan stunting, berdasarkan hubungan sebab dan akibat antar komponen penyusun masalah. Hal ini menjadi landasan dalam proses perencanaan strategi segmenting, targeting dan positioning (STP). Output perencanaan strategi STP disusun

kedalam dokumen mutu yang ditetapkan sesuai tingkatan yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting.

Simpulan dan Rekomendasi

Menetapkan program percepatan penurunan stunting di tingkatan provinsi, dituntut untuk dapat mendukung program nasional sekaligus mengakomodir program di setiap tingkatan daerah kabupaten/kota hingga desa. Hal ini berpotensi menghasilkan banyaknya program daerah, yang berisiko tumpang tindih atau bahkan tidak sejalan dengan program ditingkatan lainnya. Disisi lain banyaknya program yang ditetapkan, juga tidak menjadi ukuran dan jaminan tercapainya tujuan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah teknis berbasis kerangka konseptual STP, sebagai bagian dalam perencanaan strategi kebijakan yang terpadu dalam mengatasi permasalahan stunting terutama di tingkat pemerintah provinsi.

Maksimalisasi jangkauan manfaat program guna memenuhi target percepatan penurunan prevalensi stunting, memerlukan sinergitas program di setiap tingkatan pemerintahan. Strategi STP menawarkan serangkaian gagasan untuk menciptakan program yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. STP dapat menjadi instrumen analisis, perencanaan, penerapan sekaligus pengendalian setiap program yang dirancang, sehingga terwujud keterpaduan dalam mencapai tujuan program yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Daftar Pustaka

- Andrés Mejía Acosta, Lawrence Haddad. (2014). The politics of success in the fight against malnutrition in Peru, *Food Policy*, Volume 44, 2014, Pages 26-35, ISSN 0306-9192, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.10.009>.
- Aguayo V.M., Nair R., Badgaiyan N. & Krishna V. (2016) Determinants of stunting and poor linear growth in children under two years of age in India: an in-depth analysis of Maharashtra's Comprehensive Nutrition Survey. *Maternal and Child Nutrition* 12 (Suppl. 1): 121-140.
- Gillespie, Stuart, Judith Hodge, Sivan Yosef and Rajul Pandya-Lorch. (2016). "Nourishing Millions: Stories of Change in Nutrition." Washington, DC: International Food Policy Research Institute. <https://doi.org/10.2499/9780896295889>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Global Nutrition Report (2020): Action on equity to end malnutrition. Bristol, UK: Development Initiatives. ISBN: 978-1-9164452-6-0
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2014). A FAO report on urban and periurban agriculture in the region Growing greener cities in Latin America and the Caribbean. Rome: United Nations;
- Myatt, M., Khara, T., Schoenbuchner, S., Pietzsch, S., Dolan, C., Lelijveld, N., & Briend, A. (2018). Children who are both wasted and stunted are also underweight and have a high risk of death: a descriptive epidemiology of multiple anthropometric deficits using data from 51 countries. *Archives of public health: Archives belges de sante publique*, 76, 28. <https://doi.org/10.1186/s13690-018-0277-1>
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. 2019. Laporan Nasional Riskesdas Tahun 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). 2021. Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021). Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Semester I - Tahun 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak.

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten Tahun 2017-
2022.

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024.

World Health Organization, United
Nations Children's Fund
(UNICEF) & World Bank.
(2021). Levels and Trends in
Child Malnutrition: UNICEF /
WHO / The World Bank Group
Joint Child Malnutrition
Estimates: Key Findings of The
2021 Edition. World Health
Organization:.